LAPORAN THESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PENGENDALIAN MALARIA MENUJU ELIMINASI 2030

CHRISTIANA RAJAGUKGUK

23.C2.0090

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

LAPORAN THESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PENGENDALIAN MALARIA MENUJU ELIMINASI 2030

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

CHRISTIANA RAJAGUKGUK

23.C2.0090

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam pengendalian malaria menuju eliminasi tahun 2030. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum terkait pengendalian malaria, implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengendalian malaria, serta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target eliminasi malaria.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan pelaksanaannya dalam kenyataan empiris (law in action). Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian malaria dan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum, dokumen kebijakan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan mengenai pengendalian malaria telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara efektif, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian malaria. Di samping itu, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pengendalian malaria.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengendalian malaria perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kebijakan yang responsif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah. Langkah tersebut diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengendalian malaria dan mendukung tercapainya target eliminasi malaria pada tahun 2030.

Kata Kunci : Tanggung jawab pemerintah daerah, pengendalian malaria, penelitian hukum empiris, deskriptif kualitatif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of the Regional Government of Rote Ndao Regency in malaria control towards the elimination target by 2030. The research focuses on examining the legal framework governing malaria control, the implementation of local government responsibilities in executing malaria control programs, and the obstacles encountered in achieving malaria elimination.

This study adopts an empirical legal research method using a descriptive qualitative approach. The approach is employed to examine the gap between legal norms as prescribed in written law (law in books) and their actual implementation in practice (law in action). The research integrates a normative juridical approach, involving an analysis of relevant laws and regulations concerning malaria control, with an empirical juridical approach based on field research. The data comprise primary data obtained through interviews with relevant stakeholders and secondary data gathered from legal materials, policy documents, and relevant scientific literature. The collected data were qualitatively analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that, from a normative perspective, the legal framework governing malaria control is relatively adequate. Nevertheless, its implementation in practice has not yet been fully effective. This condition is influenced by several factors, including limitations in human resources and budgetary support, ineffective inter-sectoral coordination, and insufficient community participation in malaria prevention and control efforts. Furthermore, a gap remains between the applicable legal provisions and their practical implementation, thereby affecting the overall effectiveness of malaria control programs.

This study concludes that the responsibility of regional governments in malaria control should be strengthened by enhancing institutional capacity, optimizing inter-sectoral coordination and collaboration, and developing policies that are responsive to local conditions and needs. These measures are essential to improve the effectiveness of malaria control efforts and support the achievement of the malaria elimination target by 2030.

Keywords : Regional government responsibility, malaria control, empirical legal research, qualitative descriptive approach